PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROFIL
KEPENDUDUKAN
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, pada Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan kepada para Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyusun Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota. Profil Perkembangan Kependudukan tersebut berisi gambaran tentang kondisi dan perkembangan kependudukan di setiap Kabupaten/Kota.

Publikasi Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2022 ini sangat penting mengingat pada Pasal 58 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 mengamanatkan agar kiranya dalam proses pelayanan publik, penyusunan perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal berpedoman pada data dan informasi yang disampaikan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Disamping itu, data dan informasi kependudukan yang disajikan, akan menjadi bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berskala regional dan nasional serta berwawasan kependudukan.

Berpijak pada landasan tersebut, maka data dan informasi yang disajikan dalam Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2021 ini, disusun berdasarkan basis data yang terhubung secara Nasional dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri yang telah melalui proses Konsolidasi dan Pembersihan dari data ganda.

Dengan Profil Perkembangan Kependudukan ini, menggambarkan serta memberi informasi tentang perkembangan kependudukan Kota Parepare baik dari segi Kuantitas, Kualitas serta Tingkat Mobilitas Penduduk Kota Parepare selama kurun waktu satu tahun dan disusun berdasarkan tipologi penduduk yang ada dengan status terupdate per 31 Desember 2020.

Disadari sepenuhnya bahwa Profil Perkembangan Kependudukan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan berbagai saran, masukan serta kritikan sehingga kedepan dapat disusun dan dibuat jauh lebih baik lagi, yang dilengkapi dengan berbagai indikator dan variable tambahan, agar informasi yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan akan data dan informasi kependudukan di Parepare.

Parepare, 19 Oktober 2022
Plt. Kepala Dinas,

Hj. SURIANI, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19680221 199312 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Ruang Lingkup 2
D. Pengertian Umum Istilah Yang Digunakan 2

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE 6
BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 9
A. KUANTITAS PENDUDUK 9
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk 9
2. Kepadatan Penduduk 11
3. Laju Pertumbuhan Penduduk 12
4. Penduduk menurut Karekteristik Demograpik 13
5. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin 15
6. Keluarga 17
7. Penduduk Menurut Karakter Sosial 23
8. Kelahiran 24
9. Kematian 25

B. KUALITASPENDUDUK 26
1. Kesehatan 26
2. Pendidikan 28
3. Ekonomi 29
4. Sosial 31

C. MOBILITASPENDUDUK 33
1. Migasi Masuk (Mi) 33
2. Migrasi Keluar (Mo) 34
3. Migrasi Netto (Mn) 35
4. Migrasi Bruto (Mb) 35
5. Migrasi Desa Kota 36
6. Mobilitas Permanen 36

BAB IV KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 38
A. Kepemilikan Kartu Keluarga 38
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk 39
C. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil 40
1. Akta Kelahiran 40
2. Akta Perkawinan 41
3. Akta Perceraian 42

BAB V PENUTUP 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan alat atau instrumen pembangunan yang memegang peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Mengingat perannya yang sangat penting dan strategis tersebut, maka perencanaan yang terkait dengan pengambilan kebijakan pembangunan baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah harus berbasis pada data kependudukan yang akurat, valid dan ter-update.

Mengenai pentingnya penduduk atau kependudukan menjadi alat atau instrument dalam penentuan kebijakan perencanaan pembangunan, cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:

a. informasi pembangunan daerah; dan
b. informasi keuangan daerah.

Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya Pasal 392 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf a memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup:

a. kondisi geografis daerah;
b. demografi;
c. potensi sumber daya daerah;
d. ekonomi dan keuangan daerah;
e. aspek kesejahteraan masyarakat;
f. aspek pelayanan umum; dan
g. aspek daya saing daerah.

Pasal per pasal yang saling terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dengan rinci menjelaskan bahwa aspek demografi atau kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek lainnya seperti kondisi geografis, potensi sumber daya daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Mengenai pentingnya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, pembagian atau alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Mengingat pentingnya publikasi data kependudukan yang akurat valid dan ter-update dan bisa digunakan sebagai dasar pelayanan publik di instansi lain, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran dan lainnya, Kementerian Dalam Negeri kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjadi acuan semua pemerintah daerah dalam menyusun Profil Perkembangan Kependudukan, termasuk Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare.

B. Tujuan

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2022 ini disusun dengan memanfaatkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dipublikasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, DKB ini dipublikasi Dirjen Dukcapil Kemendagri per semester yang bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi kependudukan wilayah Kota Parepare;
2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan.
3. Menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Kota Parepare dalam merumuskan, menyusun dan mengevaluasi kebijakan pembangunan
4. Menyediakan data dan informasi bagi kalangan akademisi, pelaku bisnis dan pihak lain yang membutuhkan data Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare ini antara lain mencakup gambaran umum wilayah Kota Parepare seperti letak geografis, kondisi demografis. Kualitas dan kuantitas penduduk, mobilitas penduduk, serta kepemilikan dokumen kependudukan.

D. Pengertian Umum Istilah yang Digunakan

1. ***Penduduk*** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. ***Kependudukan*** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan penduduk, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan ekonomi setempat.
3. ***Perkembangan kependudukan*** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.
4. ***Data Kependudukan*** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil;

5. ***Profil Perkembangan Kependudukan*** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
6. ***Administrasi Kependudukan*** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. ***Kuantitas Penduduk*** adalah jumlah penduduk sebagai akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat;
8. ***Kualitas Penduduk*** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang berbudaya, berprikebadian dan layak.
9. ***Mobilitas Penduduk*** adalah pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain baik dalam daerah maupun antar daerah (melewati batas Administrasi suatu wilayah).
10. ***Persebaran Penduduk*** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
11. ***Kematian atau mortalitas menurut WHO*** adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
12. ***Mobilitas penduduk permanen (migrasi)*** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/Negara (migrasi international);
13. ***Mobilitas penduduk non permanen (circulation/sirkuler)*** adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ketempat lain melewati batas administrative. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang alik (commuting) dan menginap/mondok ;
14. ***Penduduk musiman*** merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanenn yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang.
15. ***Mobilitas penduduk ulang alik (commuting)*** adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari yang sama.
16. ***Migrasi kembali (return migration)*** adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan sensus bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda.
17. ***Migrasi semasa hidup (life time migration)*** adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan sensus tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal kelahirannya.
18. ***Migrasi Risen (recent migration)*** adalah bentuk migrasi melewati batas

wilayah administrasi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.

19. ***Penduduk Usia Kerja*** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
20. ***Penduduk angkatan kerja*** adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha.
21. ***Penduduk bukan angkatan kerja*** adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun keatas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan melaksanakan kegiatan lainnya.
22. ***Bekerja*** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam terus menerus dalam seminggu. Kegitan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
23. ***Angka partisipasi angkatan kerja*** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
24. ***Mencari pekerjaan atau pengangguran terbuka*** adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survey orang tersebut sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha.
25. ***Sekolah*** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tertinggi.
26. ***Mengurus rumah tangga*** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah tangga, dan anaknya yang membantu rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya menggurus rumah tangga dianggap bekerja.
27. ***Pendidikan tertinggi yang ditamatkan*** adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat belajar (Ijazah).
28. ***Status pekerjaan*** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan.
29. ***Angka pengangguran*** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
30. ***Bukan angkatan kerja*** adalah penduduk usia 15 tahun kebawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas.
31. ***Lahir hidup*** adalah Suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
32. ***Lahir mati*** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan:
33. ***Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)*** adalah rata-rata

banyaknya anak yang dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya.

34. ***Angka kematian bayi baru lahir*** adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28 hari) pada suatu periode per 1000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
35. ***Angka kematian kasar*** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk;
36. ***Penduduk Melek Huruf*** adalah penduduk berusia 15 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta latin, dan buta angka , buta bahassa indonesia, dan buta pengalaman dasar;
37. ***Proporsi penduduk*** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu seperti umur dan jenis kelamin;
38. ***Rasio jenis kelamin*** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
39. ***Piramida penduduk*** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
40. ***Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (depedency ratio)*** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk dibawah usia 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif;
41. ***Rasio kepadatan penduduk*** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tahun tertentu;
42. ***Angka perkawinan kasar*** adalah angka yang menunjukkan presentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu
43. ***Angka perkawinan umum*** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
44. ***Angka perceraian kasar*** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu ;
45. ***Angka perceraian umum*** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu;

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

A. LETAK GEOGRAFIS DAERAH

Kota Parepare merupakan daerah transit yang cukup strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi penghubung antara wilayah Selatan dan Utara di Sulawesi Selatan. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah, Kota Parepare merupakan pusat pelayanan antar wilayah untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kota Parepare dengan menetapkan visi sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang bertumpuh pada tiga sektor prioritas, yaitu ; sektor pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

Secara geografis, Kota Parepare memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kota Parepare terletak antara 3° 57"39" - 4° 04' 49'' Lintang Selatan dan 119° 36' 24'' - 119° 43" 40" Bujur Timur, dimana sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai.

PETA ADMINISTRATIF KOTA PAREPARE

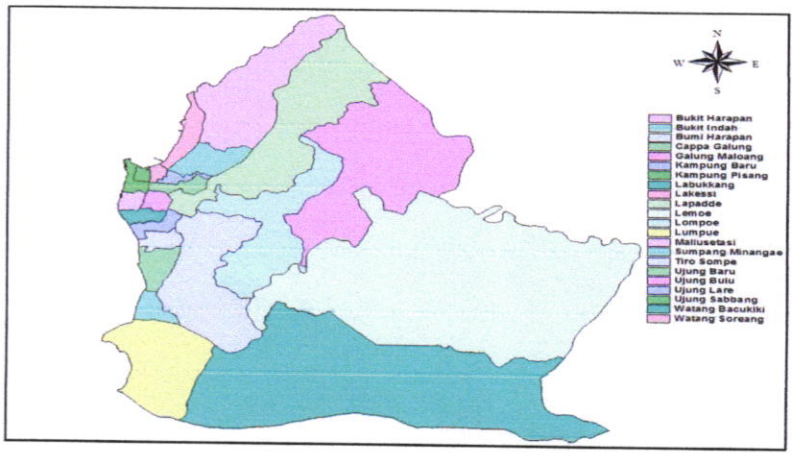

Kota Parepare mempunyai luas wilayah sebesar ± 99,33 Km2 atau 0,21 % dari luas Propinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas 4 Kecamatan dan 22 kelurahan, dengan perincian sebagai berikut :

1) Kecamatan Bacukiki Barat, terdiri atas 6 kelurahan, yaitu ; Kelurahan Bumi Harapan, Kelurahan Cappa Galung, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Sumpang Minangae, Kelurahan Tiro Sompe; dan Kelurahan Lumpue.

2) Kecamatan Bacukiki, terdiri atas 4 kelurahan, yaitu ; Kelurahan LemoE, Kelurahan Lompoe, Kelurahan Watang Bacukiki; dan Kelurahan Galung Maloang.
3) Kecamatan Ujung, terdiri atas 5 kelurahan, yaitu ; Kelurahan Mallusetasi, Kelurahan Labukkang, Kelurahan Lapadde, Kelurahan Ujung Bulu; dan Kelurahan Ujung Sabbang.
4) Kecamatan Soreang, terdiri atas 7 Kelurahan, yaitu ; Kelurahan Bukit Harapan, Kelurahan Bukit Indah, Kelurahan Kampung Pisang, Kelurahan Lakessi, Kelurahan Ujung Baru, Kelurahan Ujung Lare; dan Kelurahan Watang Soreang.

Kecamatan Bacukiki memiliki luas wilayah paling besar dengan luas sebesar 66,67 Km2 persegi atau 67,12 % dari luas wilayah Kota Parepare. Sedangkan Kecamatan Soreang memiliki daerah dengan luas wilayah terkecil dengan luas hanya sebesar 8,31 Km2 atau 8,37 % dari luas wilayah Kota Parepare. Wilayah terbesar kedua setelah Kecamatan Bacukiki adalah Kecamatan Bacukiki Barat dengan luas sebesar 13,05 Km2, menyusul Kecamatan Ujung di urutan ketiga dengan luas wilayah 11,30 Km2.

Empat kecamatan di Kota Parepare ini dipimpin 570 RT/RW dengan rincian 89 RT/RW di Kecamatan Bacukiki, 150 RT/RW di Kecamatan Ujung, 200 RT/RW di Kecamatan Soreang dan 132 RT/RW di Kecamatan Bacukiki Barat.

Ditinjau dari aspek topografi wilayah, lebih dari 85 % wilayah Kota Parepare merupakan areal yang bergelombang (15-40%) dengan luas keseluruhan 5.621 Ha, berbukit-bukit sampai bergunung (>40%) dengan luas 3.215,04 Ha, sehingga untuk pengembangan fisik kota akan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi ini.

Formasi perbukitan ini pada bagian selatan kota mendekat ke arah pantai dengan jarak terdekat 400 meter, sedangkan jarak terjauh berada di pusat kota yaitu sekitar 1,2 km. Dengan kondisi topografi seperti ini, maka wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian barat dengan luas keseluruhan ± 1.097,04 Ha, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk dan kegiatan perkotaan lainnya.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kota Parepare dengan wilayah yang bergelombang sampai bergunung, maka 87% dari luas wilayahnya terletak pada ketinggian diatas 25 meter dpl, bahkan sampai mencapai ketinggian 500 meter dpl. Daerah dengan ketinggian 0 – 25 meter dpl, berada dekat dengan pesisir pantai yang merupakan pusat kegiatan dan pemukiman penduduk.

Struktur geologi yang terdapat di Kota Parepare sebagai pembentuk struktur batuan di wilayah Kota Parepare antara lain: endapan alluvial dan pantai, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral, selain itu terdapat juga batu gunung api di Kota Parepare seperti tufu, breksi, konglomerat dan lava. Jenis tanah yang terdapat antara lain: tanah regosol yaitu tanah yang memiliki tekstur kasar dengan kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki

solum yang dangkal serta tanah alluvial yaitu tanah endapan yang memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan.

Kota Parepare beriklim tropis yang dipengaruhi oleh tekanan udara pada garis Khatulistiwa dan angin dari arah Barat dan Selatan dengan kecepatan rata-rata 2,4 m/detik. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada akhir tahun, yaitu pada bulan November dan Desember serta Januari hingga Februari, jumlah hari hujan pada musim hujan tersebut juga berbeda beda. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Maret sampai dengan September. Ukuran waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau Waktu Indonesia bagian Tengah yakni 1 jam lebih cepat dari waktu ibukota negara Jakarta dan 8 jam lebih cepat dari Greenwich Meridian Time (GMT). Berdasarkan catatan stasiun Klimatologi, suhu udara rata-rata Kota Parepare adalah 28,5°C dengan suhu minimum sebesar 25,6°C dan suhu maksimum sebesar 31,5°C.

B. KONDISI DEMOGRAFIS KOTA PAREPARE

Kota Parepare merupakan satu dari tiga kota yang ada di Sulawesi Selatan dan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2021, Kota Parepare didiami penduduk sebanyak 154.524 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 76.663 jiwa dan perempuan sebanyak 77.861 jiwa. Kecamatan Soreang memiliki jumlah penduduk paling banyak yakni sebesar 48.082 jiwa. Kemudian Kecamatan Bacukiki Barat sebesar 46.606 jiwa, selanjutnya Kecamatan Ujung 35.391 jiwa dan Kecamatan Bacukiki sebanyak 24.445 jiwa.

Pertumbuhan penduduk Kota Parepare di Tahun 2020 mencapai 2,34 persen. Pertumbuhan penduduk paling besar terjadi di Kecamatan Bacukiki dengan nilai sebesar 5,48 persen, kemudian Kecamatan Ujung dengan nilai pertumbuhan 2,06 persen, Kecamatan Bacukiki Barat dengan nilai pertumbuhan sebesar 1,93 persen dan Kecamatan Soreang dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,41 persen.

C. SUMBER DATA

1. Data Registrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) operasional status 31 Desember 2021, maupun laporan secara manual.
2. Data Konsolidasi Bersih yang dikelolah oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Situs resmi Pemerintah Kota Parepare, www.pareparekota.go.id

BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. KUANTITAS PENDUDUK

1. Jumlah dan Persebaran penduduk.

Persebaran penduduk merupakan masalah besar bagi kota-kota yang ada di Indonesia dewasa ini, selama ini penduduk lebih fokus untuk tinggal di daerah yang sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatannya lebih lengkap dan memadai serta dekat dari pusat pelayanan publik. Akibatnya, persebaran atau distribusi penduduk menjadi tidak merata dan Kota Parepare termasuk satu dari tiga kota yang ada di Sulawesi Selatan yang mengalami masalah terkait persebesaran atau distribusi penduduk yang belum merata ini, penduduk lebih banyak tinggal di daerah bawah atau pesisir, sementara di daerah atas atau wilayah pegunungan, persebaran penduduk masih sangat rendah.

Tabel 1

1. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	BACUKIKI	12203	7.9	12242	7.92	24445	15.82
2	UJUNG	17484	11.31	17907	11.59	35391	22.9
3	SOREANG	24001	15.53	24081	15.58	48082	31.12
4	BACUKIKI BARAT	22975	14.87	23631	15.29	46606	30.16
	KOTA PARE PARE	76663	49.61	77861	50.39	154524	100

(Sumber data: DKB Dinas Dukcapil, diolah)

Jumlah penduduk Kota Parepare saat ini sebanyak 154.524 Jiwa yang terdiri dari 76.663 jiwa laki-laki dan 77.861 jiwa perempuan. Dilihat dari persebaran penduduknya sepanjang Tahun 2021 ini, diketahui meskipun luas wilayahnya merupakan yang terkecil di antara tiga kecamatan lainnya, persentase penduduk yang tinggal di Kecamatan Soreang justru merupakan yang tertinggi di Kota Parepare, yaitu sebesar 31,12 persen. Sedangkan Kecamatan Bacukiki yang luas wilayahnya mencapai 66,67 km2 atau lebih dari setengah wilayah Kota Parepare, persentase penduduk yang tinggal di kecamatan tersebut, paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya, yakni 15,82 persen. Adapun persentase penduduk yang tinggal di Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Ujung, masing-masing sebesar 30,16 persen dan 22,9 persen.

Dibandingkan pada semester yang sama tahun sebelumnya, jumlah penduduk Kota Parepare pada semester dua tahun 2021 meningkat cukup signifikan, ada penambahan 3.537 jiwa penduduk. Penambahan jumlah penduduk ini karena Kementerian Dalam Negeri masih memasukkan data penduduk yang sudah pindah dari Kota Parepare tapi belum melaporkan diri ke daerah tujuan.

Tabel 2

2. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN PER KECAMATAN DAN KELURAHAN

NO	NAMA KECAMATAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	LOMPOE	6041	3.91	5952	3.85	11993	7.76
2	WT. BACUKIKI	1131	0.73	1167	0.76	2298	1.49
3	LEMOE	1511	0.98	1509	0.98	3020	1.95
4	GALUNG MALOANG	3520	2.28	3614	2.34	7134	4.62
5	KEC. BACUKIKI	12203	7.9	12242	7.92	24445	15.82
6	LABUKKANG	3662	2.37	3750	2.43	7412	4.8
7	UJUNG SABBANG	1682	1.09	1734	1.12	3416	2.21
8	UJUNG BULU	3078	1.99	3195	2.07	6273	4.06
9	LAPADDE	8084	5.23	8215	5.32	16299	10.55
10	MALLUSETASI	978	0.63	1013	0.66	1991	1.29
11	KEC. UJUNG	17484	11.31	17907	11.59	35391	22.9
12	LAKESSI	1580	1.02	1628	1.05	3208	2.08
13	UJUNG BARU	2650	1.71	2786	1.8	5436	3.52
14	WATANG SOREANG	3716	2.4	3675	2.38	7391	4.78
15	KAMPUNG PISANG	1627	1.05	1735	1.12	3362	2.18
16	UJUNG LARE	2063	1.34	2061	1.33	4124	2.67
17	BUKIT INDAH	6322	4.09	6363	4.12	12685	8.21
18	BUKIT HARAPAN	6043	3.91	5833	3.77	11876	7.69
19	KEC. SOREANG	24001	15.53	24081	15.58	48082	31.12
20	KAMPUNG BARU	2592	1.68	2725	1.76	5317	3.44
21	CAPPA GALUNG	3604	2.33	3791	2.45	7395	4.79
22	LUMPUE	4800	3.11	4954	3.21	9754	6.31
23	TIRO SOMPE	3649	2.36	3661	2.37	7310	4.73
24	SUMPANG MINANGAE	2798	1.81	2988	1.93	5786	3.74
25	BUMI HARAPAN	5532	3.58	5512	3.57	11044	7.15
26	KEC. BACUKIKI BARAT	22975	14.87	23631	15.29	46606	30.16
	KOTA PARE PARE	76663	49.61	77861	50.39	154524	100

(Sumber data: DKB Dinas Dukcapil, diolah)

Persebaran penduduk di Kota Parepare belum merata, penduduk Kota Parepare lebih terkonsentrasi di daerah tertentu yang menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk tinggi, dari 22 kelurahan di Kota Parepare, enam kelurahan di antaranya memiliki jumlah penduduk di atas 9 ribu lebih. Rinciannya Kelurahan Lompoe sebesar 11.993 jiwa, Kelurahan Lapadde sebanyak 16.299 jiwa, Kelurahan Bukit Indah sebesar 12.685 jiwa, Kelurahan Bukit Harapan sebanyak 11.876 jiwa, Kelurahan Lumpue 9.754 jiwa dan Kelurahan Bumi Harapan sebesar 11.044 jiwa.

Data di atas menggambarkan, hampir setengah penduduk Kota Parepare atau 73.651 jiwa terkonsentrasi di enam kelurahan ini. Sedangkan sisanya terbagi merata di 16 kelurahan lainnya. Padatnya jumlah penduduk yang hanya terfokus di beberapa kelurahan, menjadi perhatian Pemerintah Kota Parepare untuk melakukan pengkajian pemekaran kelurahan. Sebab dari sisi jumlah penduduk, sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran kelurahan, tetapi sayangnya, luas wilayah kelurahan yang kemungkinan dimekarkan belum ada yang memenuhi syarat.

Dari empat kelurahan yang jumlah penduduknya di atas 10 ribu, hanya Kelurahan Lapadde yang luas wilayahnya cukup besar, yakni 9,98 km2, sedangkan tiga kelurahan lainnya seperti Kelurahan Bukit Indah, Bukit Harapan dan Lompoe, masing-masing luas wilayahnya sebesar 1,19 km2, 5,56 km2 dan 5,27 km2. Sehingga dari empat kelurahan tersebut,

hanya Kelurahan Lapadde yang paling mungkin untuk dimekarkan wilayahnya, itupun dengan catatan, Kelurahan Lapadde mendapatkan tambahan luas wilayah sebesar 0,2 km2 dari kelurahan di sekitarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, persyaratan pembentukan kelurahan untuk wilayah Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa dengan luas wilayah paling sedikit 5 km2, memiliki sarana dan prasarana memadai serta mampu meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dari sisi luas wilayah serta sarana dan prasarana, dua Kelurahan di Kecamatan Bacukiki, yaitu Kelurahan Watang Bacukiki dan Kelurahan Lemoe sebenarnya sangat memenuhi syarat untuk pemekaran kelurahan baru, tetapi dari sisi jumlah penduduk belum memenuhi syarat karena jumlah penduduknya masih sedikit. Luas wilayah Kelurahan Watang Bacukiki adalah sebesar 25,52 km 2 dengan Jumlah penduduk sebanyak 2.298 jiwa, sedangkan luas wilayah Kelurahan Lemoe sebesar 29, 75 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.020 jiwa.

2. Kepadatan Penduduk

Kota Parepare merupakan kota dengan penduduk yang cukup padat. Tabel 3 memperlihatkan kepadatan Penduduk di Kota Parepare dengan luas 99.33 Km persegi. Kota Parepare didiami oleh 154.524 Jiwa atau dengan kepadatan sebesar 1.556 Jiwa/Km persegi.

3. KEPADATAN PENDUDUK

NO	KECAMATAN	JUMLAH	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK
1	BACUKIKI	24445	66,7	366
2	UJUNG	35391	8,33	4249
3	SOREANG	48082	13.00	3699
4	BACUKIKI BARAT	46606	11.30	4124
	KOTA PARE PARE	154524	99.33	1556

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa persebaran atau distribusi penduduk di Kota Parepare belum merata. Kepadatan penduduk di Kecamatan Bacukiki jauh lebih rendah dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya, saat ini kepadatan penduduk di Kecamatan Bacukiki sebesar 366 jiwa dalam 1 Km persegi. Sementara kepadatan penduduk di Kecamatan Ujung sebesar 4.249 jiwa per km2, Kecamatan Soreang 3.699 per km2, dan Kecamatan Bacukiki Barat dengan tingkat kepadatan 4.124 jiwa per km2.

Merunut pada hasil sensus penduduk Tahun 2020, saat ini paling tidak ada 22..073 jiwa penduduk Kota Parepare yang tinggal tidak sesuai alamat di Kartu Keluarga dan KTP-el. Tingginya jumlah penduduk yang tidak tinggal sesuai alamat KK dan KTP-el menyulitkan perhitungan tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare secara faktual.

Sebagaian penduduk dari hasil sensus ini, secara faktual sudah tinggal di kawasan pemukiman baru di daerah pegunungan, khususnya di Kecamatan Bacukiki, tetapi secara administrasi masih tinggal di daerah pesisir seperti Kecamatan Ujung, Soreang atau Bacukiki Barat. Beberapa alasan penduduk belum memindahkan data kependudukan sesuai alamat rumah saat ini diantaranya;

Pertama, akses pendidikan yang baik dan cukup memadai lokasinya ada di daerah pesisir, dengan masih beralamat di daerah pesisir meski secara faktual sudah tinggal di daerah pegunungan, penduduk menghindari sistem zonasi dan ingin memastikan anggota keluarganya bersekolah di sekolah yang fasilitasnya lengkap dengan tenaga pengajar yang kompeten. Kedua, akses ke fasilitas kesehatan yang cukup memadai juga berada di daerah peisisr. Ketiga, akses ke sumber-sumber ekonomi sebagain besar berada di kawasan pesisir.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan penduduk di Kota Parepare selama kurun waktu 1 tahun, dapat digambarkan seperti berikut.

4. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO	KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN 2020	PENDUDUK TAHUN 2021	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
1	BACUKIKI	23176	24445	5,48
2	UJUNG	34676	35391	2,06
3	SOREANG	47413	48082	1,41
4	BACUKIKI BARAT	45722	46606	1,93
	KOTA PARE PARE	150987	154524	2,34

Tabel 4 di atas mengindikasikan jika Kecamatan Bacukiki merupakan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk paling tinggi di Kota Parepare dengan persentase cukup tinggi yakni sebesar 5,48 persen. Padatnya wilayah perkotaan atau daerah pesisir yang lokasinya berada di Kecamatan Ujung, Soreang dan Bacukiki Barat, mendorong tumbuhnya kawasan pemukiman penduduk baru yang lokasinya berada di daerah pegunungan di Kecamatan Bacukiki. Sebagian besar kawasan pemukiman baru tersebut berada di Kelurahan Lompoe dan Kelurahan Galung Maloang.

4. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

a) Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Dalam rasio jenis kelamin ini berguna untuk perkembangan perencanaan pembangunan, gender, dan kepentingan demokrasi.

5. RASIO JENIS KELAMIN

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RASIO JENIS KELAMIN
1	BACUKIKI	12203	12242	99,68
2	UJUNG	17484	17907	97,64
3	SOREANG	24001	24081	99,67
4	BACUKIKI BARAT	22975	23631	97,22
	KOTA PARE PARE	76663	77861	98,46

Dari tabel 5 terlihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (RKJ) atau *Sex Ratio* penduduk Kota Parepare adalah **98** yang berarti bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Karena berdasarkan rasio di atas dari 100 penduduk perempuan Kota Parepare terdapat kurang lebih 98 penduduk laki-laki.

b) Piramida Penduduk

6. PIRAMIDA PENDUDUK

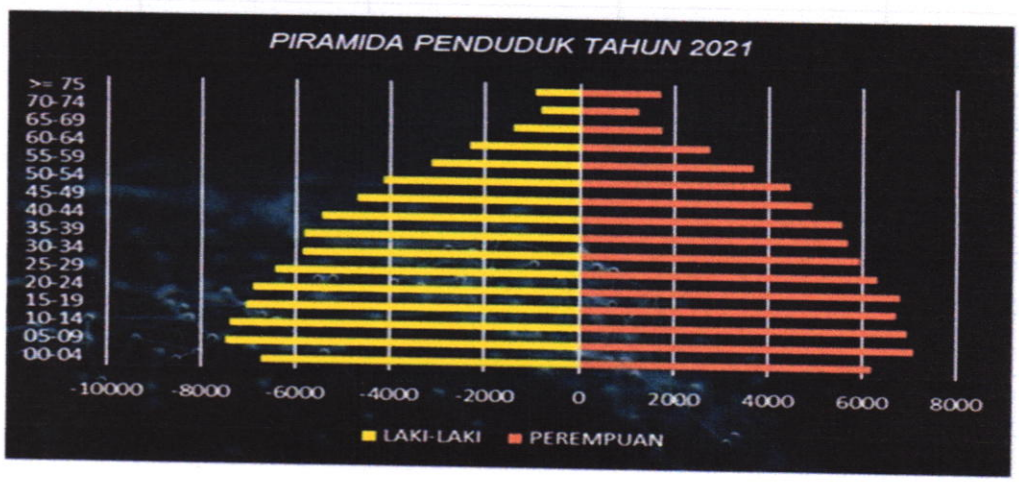

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur.

Piramida penduduk Kota Parepare menunjukkan struktur penduduk constrictive dengan struktur penduduk usia produktif atau penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun lebih besar dibandingkan kelompok umur di atas atau di bawahnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok 0 – 4 tahun yang terletak pada dasar piramida jumlahnya cukup signifikan. Pada piramida tersebut juga tergambar, penduduk usia 5 - 9 tahun memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan penduduk kelompok umur lainnya.

Sedangkan penduduk kelompok usia 70 sampai dengan 74 tahun, sebagaimana tergambar dalam piramida penduduk, memiliki proporsi jumlah penduduk paling kecil dibandingkan yang lain. Gambaran proporsi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur ini bisa menjadi acuan bagi pengambil kebjakan dalam menyusunan perencanaan pembangunan daerah. Baik itu kebijakan terkait perencanaan pelayanan dasar seperti pendidikan, dan kesehatan maupun dalam perencanaan yang mendukung peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Struktur dalam piramida penduduk ini juga menggambarkan jika Kota Parepare termasuk satu dari tiga kota yang ada di Sulawesi Selatan yang mendapat limpahan bonus demografi. Hal ini ditandai dengan melimpahnya penduduk usia produktif dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Jika dikelola dengan baik, tingginya jumlah penduduk usia produktif ini bakal menjadi potensi yang baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, potensi bonus demografi ini bisa menjadi bencana demografi.

Sebagai langka antisiipatif, pemerintah harus mampu menyiapkan ketersediaan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pemerintah juga harus mampu menyiapkan program dan kegiatan yang memungkinkan penduduk bisa mengembangkan skill atau kapasitasnya sehingga ke depannya kelompok usia produktif ini mampu bersaing untuk memasuki pasar kerja baik yang disediakan oleh pemerintah maupun dunia usaha.

c) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan *(dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Rasio ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar. Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15 – 64 Tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 Tahun) dan penduduk yang

dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif

7. RASIO KETERGANTUNGAN

NO	KECAMATAN	USIA DI BAWAH 14 TAHUN	USIA DI ATAS 65 TAHUN	JUMLAH USIA NON PRODUKTIF	USIA PRODUKTIF	RASIO
1	BACUKIKI	7050	968	8.018	16427	48,81
2	UJUNG	9317	1915	11.232	24159	46,49
3	SOREANG	12838	2574	15.412	32670	47,17
4	BACUKIKI BARAT	12706	2453	15.159	31447	48,20
	KOTA PARE PARE	41911	7910	49.821	104703	47,58

Tabel 7 mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan Kota Parepare sebesar **47.58** Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Parepare mempunyai tanggungan sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif. Tabel ini juga menunjukkan jika rasio ketergantungan tertinggi terdapat di Kecamatan Bacukiki dengan rasio ketergantungan sebesar **48.81** Sedangkan rasio ketergantungan paling rendah berada di Kecematan Ujung dengan nilai sebesar **46,49.**

5. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Dalam hal ini konsep perkawinan difokuskan pada keadaan di mana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga.

8. PROPORSI PENDUDUK KOTA PAREPARE BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN

NO	STATUS KAWIN	LK	%	PR	%	JUMLAH	%
1	BELUM KAWIN	42118	27,26	35860	23,21	77978	50,5
2	KAWIN	31989	20,7	33880	21,93	65869	42,6
3	CERAI HIDUP	1445	0,94	2453	1,59	3898	2,52
4	CERAI MATI	1111	0,72	5668	3,67	6779	4,39
	JUMLAH	76663	49,61	77861	50,39	154524	100

Setelah diakomodasinya pencatatan status kawin siri dalam penerbitan dokumen Adminduk, jumlah penduduk dengan status kawin meningkat cukup signifikan menjadi 42,6 persen atau sebesar 65.869 jiwa , Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 kini memang mengakomodir pencatatan perkawinan status kawin belum tercatat. Sebelum terbitnya Permendagri ini, pencatatan bagi penduduk yang sudah menikah siri atau sah secara agama didorong untuk melakukan isbat nikah supaya bisa tercatat menjadi status kawin di dokumen Adminduknya.

a) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

9. ANGKA PERKAWINAN MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	UMUR	BELUM KAWIN	%	KAWIN	%	CERAI HIDUP	%	CERAI MATI	%	JUMLAH	%
1	00-04	12950	8,38							12950	8,38
2	05-09	14596	9,45							14596	9,45
3	10-14	14362	9,29	3	0					14365	9,30
4	15-19	13467	8,72	292	0,19	5	0			13764	8,91
5	20-24	10681	6,91	2927	1,89	109	0,07	10	0	13727	8,88
6	25-29	5363	3,47	7018	4,54	343	0,22	18	0	12742	8,25
7	30-34	2234	1,45	8979	5,81	498	0,32	71	0,1	11782	7,62
8	35-39	1234	0,8	9574	6,2	574	0,37	138	0,1	11520	7,46
9	40-44	911	0,59	9232	5,97	595	0,39	281	0,2	11019	7,13
10	45-49	667	0,43	8037	5,2	499	0,32	412	0,3	9615	6,22
11	50-54	573	0,37	6932	4,49	447	0,29	659	0,4	8611	5,57
12	55-59	378	0,24	5157	3,34	362	0,23	928	0,6	6825	4,42
13	60-64	275	0,18	3587	2,32	205	0,13	1031	0,7	5098	3,30
14	65-69	139	0,09	1962	1,27	123	0,08	954	0,6	3178	2,06
15	70-74	82	0,05	1091	0,71	69	0,04	841	0,5	2083	1,35
16	>= 75	66	0,04	1078	0,7	69	0,04	1436	0,9	2649	1,71
17	JUMLAH	77978	50,46	65869	42,63	3898	2,52	6779	4,4	154524	100

b) Rata-Rata Umur Kawin Pertama

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah. Untuk mendapatkan rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat para demographer mengembangkan rata-rata usia kawin dari data tentang proporsi penduduk yang masih lajang menurut umur.

Estimasi rata-rata usia kawin dengan cara ini disebut *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM). Definisi *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) adalah perkiraan (estimasi) rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang masih lajang (belum kawin). Kegunaan tersedianya indicator rata- rata umur kawin pertama dengan metode SMAM akan memudahkan para penentu kebijakan pada perencanaan pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Data yang diperlukan :

1) Data penduduk kelompok umur 15 – 54 tahun menurut kelompok umur lima tahunan dan jenis kelamin
2) Data penduduk yang belum kawin pada kelompok umur 15 – 54 tahun menurut kelompok umur lima tahunan dan Jenis Kelamin.

10. PRESENTASE KELOMPOK UMUR

NO	UMUR	BELUM KAWIN	%	KAWIN
1	00-04	12950	12950	100
2	05-09	14596	14596	100
3	10-14	14362	14365	99,98
4	15-19	13467	13764	97,84
5	20-24	10681	13727	77,81
6	25-29	5363	12742	42,09
7	30-34	2234	11782	18,96
8	35-39	1234	11520	10,71
9	40-44	911	11019	8,27
10	45-49	667	9615	6,94
11	50-54	573	8611	6,65
12	55-59	378	6825	5,54
13	60-64	275	5098	5,39
14	65-69	139	3178	4,37
15	70-74	82	2083	3,94
16	>= 75	66	2649	2,49
17	JUMLAH	77978	154524	50,46

6. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga ini dapat terdiri dari Bapak, Ibu dan anak-anaknya, dapat juga terdiri dari Bapak, Ibu, Anak-anaknya dan keluarga lainnya baik itu mertua, saudara cucu ataupun famili lainnya dengan status menumpang. Data keluarga menjadi penting untuk menyusun berbagai program pembangunan seperti peningkatan ekonomi, penghasilan dan penanganan kemiskinan dan lain sebagainya. Keluaga sebagai unit terkecil dari masyarakat merupakan tempat pertama dan utama dalam tumbuh kembang anak, baik dari sisi fisik, pembentukan karakter dan pengembangan intelektual. Oleh sebab itu, perencanaan keluarga menjadi penting, tidak hanya jumlah anggota keluarga tetapi juga kualitasnya.

a) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Anggota Keluarga

Keluarga dibentuk dalam kelompok orang yang terikat dan mempunyai hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi dua yaitu *inti/batin (nuclear family)* dan keluarga luas *(extended family)*. Besarnya jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan keluarga, dimana semakin kecil jumlah anggota keluarga

diasumsikan akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Pada saat sekarang ini sudah muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau biasa disebut dengan *sandwiches family,* dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam kehidupan semacam ini.

11. RATA RATA ANGGOTA KELUARGA

NO	KELURAHAN	PENDUDUK	KEPALA KELUARGA	RATA-RATA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA KELUARGA
1	GALUNG MALOANG	7134	2022	4
2	LEMOE	3020	907	3
3	LOMPOE	11993	3403	4
4	WT. BACUKIKI	2298	685	3
5	UJUNG BULU	6273	1909	3
6	MALLUSETASI	1991	632	3
7	UJUNG SABBANG	3416	1053	3
8	LAPADDE	16299	4747	3
9	LABUKKANG	7412	2268	3
10	KAMPUNG PISANG	3362	1026	3
11	WATANG SOREANG	7391	2181	3
12	UJUNG BARU	5436	1640	3
13	LAKESSI	3208	981	3
14	BUKIT HARAPAN	11876	3448	3
15	BUKIT INDAH	12685	3664	3
16	UJUNG LARE	4124	1240	3
17	SUMPANG MINANGAE	5786	1808	3
18	KAMPUNG BARU	5317	1641	3
19	BUMI HARAPAN	11044	3143	4
20	CAPPA GALUNG	7395	2279	3
21	LUMPUE	9754	2996	3
22	TIRO SOMPE	7310	2157	3
KOTA PAREPARE		154524	45830	3

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Parepare sekitar 3 orang dalam satu keluarga. Informasi tentang rata-rata jumlah anggota keluaga ini dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan program keluarga berencana di wilayah Kota Parepare dan dapat digunakan Pemerintah Kota dalam merencanakan kebutuhan perumahan, seperti untuk menentukan ukuran rumah dengan berbagai tipe agar dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat.

b) Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status Hubungan dengan Kepala Keluarga digunakan untuk melihat banyaknya keluarga, menurut jenis kelamin, pola pengaturan

tinggal bersama (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti, suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orangtua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga ataupun kerabat lainnya.

Tabel ini menunjukkan status hubungan antara anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga.

12. STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA

NO	STATUS HUBUNGAN DALAM KELUARGA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPALA KELUARGA	34875	10955	45830
2	SUAMI	1		1
3	ISTRI		29078	29078
4	ANAK	37665	32771	70436
5	MENANTU	81	53	134
6	CUCU	1410	1259	2669
7	ORANG TUA	71	442	513
8	MERTUA	83	490	573
9	FAMILI LAIN	2419	2727	5146
10	PEMBANTU	1	2	3
11	LAINNYA	57	84	141
	JUMLAH	76663	77861	154524

c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga penting untuk diketahui, terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lain.

13. KEPALA KELUARGA BERDASARKAN KELOMPOK USIA

NO	UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	00-04						
2	05-09						
3	10-14	1	0,00		0,00	1	0,00
4	15-19	126	0,00	64	0,00	190	0,00
5	20-24	1369	2,80	3415	6,98	1681	3,44
6	25-29	3394	6,94	527	1,08	3921	8,01
7	30-34	4474	9,14	665	1,36	5139	10,50
8	35-39	4887	9,99	828	1,69	5715	11,68
9	40-44	4868	9,95	1037	2,12	5905	12,07
10	45-49	4296	8,78	1077	2,20	5373	10,98
11	50-54	3792	7,75	1299	2,65	5091	10,40
12	55-59	2794	5,71	1327	2,71	4121	8,42
13	60-64	2188	4,47	1258	2,57	3446	7,04
14	65-69	1206	2,46	859	1,76	2065	4,22
15	70-74	739	1,51	751	1,53	1490	3,05
16	>= 75	741	1,51	948	1,94	1689	3,45
17	JUMLAH	34875	71,28	14055	28,72	48930	100,00

Tabel 13 ini mengindikasikan bahwa berdasarkan kelompok umur, proporsi kepala keluarga dengan jumlah terbesar berada di kelompok

umur 40-44 tahun dengan persentase sebesar 12,07 persen. Menyusul kelompok umur 35 -39 tahun dengan persentase sebesar 11,68 persen. Sedangkan persentase paling rendah untuk kepala keluarga berdasar kelompok umur ada pada kelompok umur 70 – 74 tahun dengan persentase sebesar 3,05 persen.

d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Kepala Keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak Laki-laki dan Perempuan yang menjadi Kepala Keluarga, bagaimana kecenderungan di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang di kepalai oleh seorang perempuan.

Pada tabel 13 dapat kita lihat bahwa di Kota Parepare laki-laki yang menjadi Kepala Keluarga sebesar 71.28 % sedangkan Kepala Keluarga perempuan 28.72 %.

e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi Kepala Keluarga baik Laki-laki maupun Perempuan berstatus menikah maupun tidak mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun cerai mati.

14. KEPALA KELUARGA BERDASARKAN STATUS KAWIN

NO	STATUS KAWIN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	BELUM KAWIN	1521	3,32	1094	2,39	2615	5,71
2	KAWIN	31122	67,91	3140	6,85	34262	74,76
3	CERAI HIDUP	1249	2,73	1911	4,17	3160	6,90
4	CERAI MATI	983	2,14	4810	10,50	5793	12,64
	JUMLAH	34875	76,10	10955	23,90	45830	100,00

Tabel 14 ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan di Kota Parepare Kepala Keluarga berstatus Kawin sebesar 74,76 %, berstatus Belum Kawin 5,71 %, berstatus Cerai Hidup 6,90 % dan yang berstatus Cerai Mati 12,54 %. Sedangkan jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa Kepala Keluarga yang berstatus Kawin didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 67,91, sedangkan Kepala Keluarga Perempuan yang berstatus Kawin sebesar 6,85 %

f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia, serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh Kepala Keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

15. KEPALA KELUARGA BERDASARKAN PENDIDIKAN AKHIR

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	505	1,11	387	0,85	892	1,95
2	BELUM TAMAT SD/SEI	685	1,50	430	0,94	1115	2,44
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	6375	13,96	3349	7,33	9724	21,30
4	SLTP/SEDERAJAT	5754	12,60	2167	4,75	7921	17,35
5	SLTA/SEDERAJAT	15398	33,72	3390	7,42	18788	41,14
6	DIPLOMA I/II	177	0,39	82	0,18	259	0,57
7	AKADEMI/DIPLOMA II	629	1,38	226	0,49	855	1,87
8	DIPLOMA IV/STRATA I	4746	10,39	846	1,85	5592	12,25
9	STRATA-II	568	1,24	77	0,17	645	1,41
10	STRATA-III	38	0,08	1	0,00	39	0,09
	JUMLAH	34875	76,37	10955	23,99	45830	100,37

Menilik tabel di atas, dapat disimpulkan jika sebagian besar Kepala Keluarga berdasarkan tingkat pendidikan didominasi tamat SLTA/sederajat dengan persentase sebesar 41,14 persen, setelah itu menyusul tamat SD/sederajat dengan persentase sebesar 21,90 persen dan kemudian masing-masing tamat SLTP/sederajat sebesar 17,35 persen dan Diploma IV/Strata 1 sebesar 12,25 persen.

Data proporsi Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan Akhir ini kemungkinan belum mencerminkan data sebenarnya, hal ini dimungkinkan karena, di antara sekian elemen biodata di dalam dokumen administrasi kependudukan, elemen tingkat pendidilkan merupakan salah satu elemen data penduduk yang belum terupdate secara baik.

g) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap pos ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

16. KEPALA KELUARGA BERDASARKAN PEKERJAAN

NO	STATUS KAWIN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJ	1004	2,20	584	1,28	1588	3,48
2	MENGURUS RUMAH TANGGA			7773	17,02	7773	17,02
3	PELAJAR/MAHASISWA	395	0,87	228	0,50	623	1,36
4	PENSIUNAN	1057	2,31	276	0,60	1333	2,92
5	PEGAWAI NEGERI SIPI	2083	4,56	444	0,97	2527	5,53
6	TENTARA NASIONAL II	461	1,01			461	1,01
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	860	1,88	1	0,00	861	1,89
8	PERDAGANGAN	99	0,22	27	0,06	126	0,28
9	PETANI/PEKEBUN	1246	2,73	32	0,07	1278	2,80
10	PETERNAK	10	0,02			10	0,02
11	NELAYAN/PERIKANAN	688	1,51	2	0,00	690	1,51
12	INDUSTRI	12	0,03	1	0,00	13	0,03
13	KONSTRUKSI	28	0,06			28	0,06
14	TRANSPORTASI	344	0,75	1	0,00	345	0,76
15	KARYAWAN SWASTA	2630	5,76	190	0,42	2820	6,18
16	KARYAWAN BUMN	479	1,05	24	0,05	503	1,10
17	KARYAWAN BUMD	68	0,15	1	0,00	69	0,15
18	KARYAWAN HONORER	402	0,88	53	0,12	455	1,00
19	BURUH HARIAN LEPAS	2582	5,65	24	0,05	2606	5,71
20	BURUH TANI/PERKEBU	38	0,08	3	0,01	41	0,09
21	BURUH NELAYAN/PER	45	0,10			45	0,10
22	BURUH PETERNAKAN	5	0,01			5	0,01
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA			4	0,01	4	0,01
24	TUKANG CUKUR	4	0,01			4	0,01
26	TUKANG BATU	217	0,48			217	0,48
27	TUKANG KAYU	123	0,27			123	0,27

29 TUKANG LAS/PANDAI	7	0,02			7	0,02
30 TUKANG JAHIT	23	0,05	26	0,06	49	0,11
32 PENATA RIAS	4	0,01	1	0,00	5	0,01
33 PENATA BUSANA			1	0,00	1	0,00
34 PENATA RAMBUT	1	0,00	1	0,00	2	0,00
35 MEKANIK	18	0,04			18	0,04
36 SENIMAN	7	0,02			7	0,02
38 PARAJI	1	0,00			1	0,00
39 PERANCANG BUSANA	1	0,00	1	0,00	2	0,00
40 PENTERJEMAH	1	0,00			1	0,00
41 IMAM MASJID	5	0,01			5	0,01
42 PENDETA	18	0,04			18	0,04
43 PASTOR	2	0,00			2	0,00
44 WARTAWAN	38	0,08	1	0,00	39	0,09
45 USTADZ/MUBALIGH	8	0,02	1	0,00	9	0,02
46 JURU MASAK	2	0,00			2	0,00
60 WALIKOTA	1	0,00			1	0,00
61 WAKIL WALIKOTA	1	0,00			1	0,00
63 ANGGOTA DPRD KAB./	19	0,04	1	0,00	20	0,04
64 DOSEN	153	0,34	15	0,03	168	0,37
65 GURU	393	0,86	196	0,43	589	1,29
67 PENGACARA	13	0,03	2	0,00	15	0,03
68 NOTARIS	2	0,00	3	0,01	5	0,01
69 ARSITEK	3	0,01			3	0,01
71 KONSULTAN	8	0,02			8	0,02
72 DOKTER	18	0,04	10	0,02	28	0,06
73 BIDAN			9	0,02	9	0,02
74 PERAWAT	31	0,07	18	0,04	49	0,11
75 APOTEKER	3	0,01	1	0,00	4	0,01
79 PELAUT	229	0,50			229	0,50
80 PENELITI	1	0,00			1	0,00
81 SOPIR	583	1,28			583	1,28
82 PIALANG	1	0,00			1	0,00
84 PEDAGANG	171	0,37	61	0,13	232	0,51
85 PERANGKAT DESA	2	0,00			2	0,00
87 BIARAWAN/BIARAWATI			4	0,01	4	0,01
88 WIRASWASTA	18211	39,88	929	2,03	19140	41,92
89 PEKERJAAN LAINNYA	16	0,04	6	0,01	22	0,05
JUMLAH	34875	76,37	10955	23,99	45830	100,37

Tabel 16 ini mengindikasikan jika jenis pekerjaan wiraswasta merupakan pekerjaan paling dominan yang dilakoni kepala keluarga di Kota Parepare dengan persentase sebesar 41, 92 persen. Dominannya pekerjaan wiraswasta ini sejalan dengan kondisi social ekonomi penduduk Kota Parepare yang sebagian besar pendapatannya mengandalkan dari sektor jasa. Setelah wiraswasta, jenis pekerjaan lainnya yang juga persentasenya cukup tinggi adalah mengurus rumah tangga dengan persentase sebesar 17,02 persen, setelah itu menyusul pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan persentase sebesar 5,53 persen.

7. Penduduk Menurut Karakter Sosial

a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

17. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN AKHIR

NO	PENDIDIKAN AKHIR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	15624	10,11	14819	9,59	30443	19,7
2	BELUM TAMAT SD/SEDE	8459	5,47	8015	5,19	16474	10,66
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	10759	6,96	12490	8,08	23249	15,05
4	SLTP/SEDERAJAT	12001	7,77	12993	8,41	24994	16,17
5	SLTA/SEDERAJAT	22936	14,84	20790	13,45	43726	28,3
6	DIPLOMA I/II	204	0,13	351	0,23	555	0,36
7	AKADEMI/DIPLOMA III/	700	0,45	1567	1,01	2267	1,47
8	DIPLOMA IV/STRATA I	5355	3,47	6437	4,17	11792	7,63
9	STRATA-II	586	0,38	387	0,25	973	0,63
10	STRATA-III	39	0,03	12	0,01	51	0,03
.	JUMLAH	76663	49,61	77861	50,39	154524	100

Tabel 17 ini menunjukkan jika dari 45.830 Kepala Keluarga di Kota Parepare 41,14 % diantaranya merupakan tamatan SLTA/sederajat. Setelah itu tamat SD/sederajat sebesar 21,30 persen dan tamat SLTP/sederajat sebesar 13,35 persen, data tingkat pendidikan penduduk Kota Parepare sudah mulai akurat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mulai akuratnya data tingkat pendidikan ini karena belakangan ini Dinas Dukcapil Kota Parepare proaktif menghubungi warga yang belum memiliki dokumen Adminduk seperti KIA dan KTP-el bagi penduduk yang baru memasuki usia 17 tahun. Penduduk juga diminta untuk mengupdate biodata kependudukan, termasuk tingkat pendidikan.

b) Jumlah Penduduk Menurut Agama

18. PENDUDUK KOTA PAREPARE BERDASARKAN AGAMA

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	ISLAM	72171	46,71	73384	47,49	145555	94,20
2	KRISTEN	2698	1,75	2644	1,71	5342	3,46
3	KATHOLIK	1027	0,66	1059	0,69	2086	1,35
4	HINDU	386	0,25	388	0,25	774	0,50
5	BUDDHA	373	0,24	382	0,25	755	0,49
6	KHONGHUCU	2	0,00	3	0,00	5	0,00
7	KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME	6	0,00	1	0,00	7	0,00
.	JUMLAH	76663	49,61	77861	50,39	154524	100,00

Tabel 18 menunjukkan bahwa Mayoritas Penduduk Kota Parepare beragama Islam dengan persentase sebesar 94,20 %, kemudian disusul penduduk yang beragama Kristen dengan persentase 3,46 %, Katholik 1,35 %, Budha 0,50 %, Hindu 0,49 % dan sisanya masing-masing merupakan penganut kepercayaan dan Konghuchu. Dibukanya penambahan kolom agama bagi penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana telah diputuskan Mahkamah Konstitusi, mendorong beberapa pihak yang sebelumnya merupakan penganut kepercayaan agama lain, berpindah atau beralih ke agama semula, yakni sebagai penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan baru itu terlihat dengan mulai adanya penduduk yang mencatatkan dirinya sebagai penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setidaknya hingga saat ini sudah ada enam penduduk yang mencatatkan dirinya sebagai penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kota Parepare.

c) Jumlah Penduduk Menurut Kecatatan

19. PENDUDUK KOTA PAREPARE BERDASARKAN JENIS KECACATAN

NO	JENIS CACAT	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	CACAT FISIK	54	0,03	44	0,03	98	0,06
2	CACAT NETRA/BUTA	13	0,01	18	0,01	31	0,02
3	CACAT RUNGU/WICARA	15	0,01	18	0,01	33	0,02
4	CACAT MENTAL/JIWA	49	0,03	36	0,02	85	0,06
5	CACAT FISIK DAN MENTAL	21	0,01	17	0,01	38	0,02
6	CACAT LAINNYA	20	0,01	18	0,01	38	0,02
.	JUMLAH	172	0,11	151	0,10	323	0,21

Pada prinsipnya jumlah penduduk berdasarkan kecacatan ini belum mencerminkan data penduduk berdasarkan kecacatan secara menyeluruh, sebab hingga kini data lengkap terkait jumlah penduduk dari kelompok rentan ini masih bersifat parsial.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sebagai instansi pelayanan publik yang tugas utamanya melakukan pelayanan publik penerbitan dokumen administrasi kependudukan, termasuk penerbitan dokumen Adminduk pada kelompok disabilitas, terus melakukan sejumlah langkah supaya data penduduk dari kelompok disabilitas bisa lebih akurat dan hak-hak kelompok ini untuk mendapatkan dokumen Adminduk bisa terpenuhi.

Salah satu layanan yang dilakukan untuk menjangkau penduduk kelompok disabilitas ini yakni dengan mendatangi dan memberikan pelayanan langsung pada penduduk kelompok disabilitas melalui inovasi On The Spot. Inovasi On The Spot ini setidaknya bisa memberikan gambaran secara riil terkait jumlah atau penduduk kelompok disabilitas yang sudah terpenuhi hak-haknya untuk untuk mengakses penerbitan dokumen Adminduk.

8. Kelahiran

a) Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan, khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan data untuk perhitungan berbagai indikator fertilitas lainnya.

20. JUMLAH KELAHIRAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	BACUKIKI	143	149	292
2	UJUNG	218	196	414
3	SOREANG	241	204	445
4	BACUKIKI BARAT	271	251	522
	KOTA PARE PARE	873	800	1673

Angka Kelahiran sesuai Tabel 20 menunjukkan bahwa Total Jumlah Kelahiran sepanjang Tahun 2021 terdapat 1.673 Bayi yang lahir, dengan rincian Kecamatan Bacukiki Barat sebanyak 522 jiwa, Kecamatan Soreang sebanyak 445 jiwa, Kecamatan Ujung sebanyak 414 dan Kecamatan Bacukiki sebesar 292 jiwa. Angka kelahiran ini diperoleh berdasarkan bayi yang lahir pada Tahun 2021 yang mengakses penerbitan dokumen Adminduk di Dinas Dukcapil Kota Parepare.

Supaya data terkait jumlah kelahiran di Kota Parepare akurat, saat ini Dinas Dukcapil Kota Parepare bekerjasama dengan sejumlah fasilitas layanan kesehatan di Kota Parepare dalam memberikan layanan penerbitan dokumen Adminduk seperti Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga bagi anak yang baru saja lahir di sarana fasilitas kesehatan. Kerjasama ini cukup meningkatkan kepemilikan dokumen Adminduk bagi anak baru lahir.

b) Angka Kelahiran Kasar

Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang tidak beresiko melahirkan (anak-anak, laki- laki dan orangtua). Angka Kelahiran Kasar/Crude Birth Rate (CBR) ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Dengan menggunakan rumus CBR=b/px1000 diperoleh Angka Kelahiran Kasar (CBR) = 1.673/154.524 x1000 = 10.82 atau dari 1000 penduduk terjadi 11 kali peristiwa kelahiran sepanjang tahun 2021.

9. Kematian

a) **Jumlah Kematian**

Jumlah kematian menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang mati yang terjadi di suatu daerah pada tahun tertentu. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu, data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/mortalitas lainnya

Masih kurangnya kesadaran penduduk Kota Parepare untuk melaporkan kematian salah satu anggota keluarganya kepada pihak terkait termasuk dalam hal administrasi kependudukan. Membuat data tentang laporan jumlah kematian pada tahun tertentu menjadi tidak realistis. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus. Karena kebanyakan warga melaporkan kematian salah satu anggota keluarganya dalam jangka waktu yang cukup lama, setelah peristiwa itu terjadi. Sehingga di database Kependudukan ada warga yang sebenarnya sudah meninggal tetap tercatat masih hidup. Jadi untuk pencatatan jumlah kematian kami tidak bisa menampilkan pada edisi kali ini. Kedepannya tentu ini menjadi pertimbangan bagi kami untuk terus berinovasi dan melakukan sosialisasi agar data yang kami miliki benar-benar akurat dan bisa di pertanggung jawabkan.

B. KUALITAS PENDUDUK

1. Kesehatan

a. Kelahiran

1) Angka Kelahiran Menurut Umur (*Age Sfesific Fertility Rate/ASFR*)

Tingkat kelahiran yang terjadi menurut umur sangat berbeda, dengan demikian tingkat kelahiran yang terjadi diantara penduduk perempuan pada kelompok umur 20 -24 tahun sangat berbeda dengan penduduk perempuan pada kelompok umur 35– 39 tahun. ASFR merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 perempuan usia produktif (15 –49 tahun) menurut kelompok umur yang sama. Angka kelahiran ini sudah memperhitungkan perbedaan kemampuan melahirkan dari setiap kelompok umur yangberbeda. Sehingga pengetahuan tentang ASFR akan berguna dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta perencanaan pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Indikator ASFR juga akan digunakan untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan masyarakat, sumber perhitungan banyaknya penduduk umur 0 – 1 tahun pada perhitungan proyeksi penduduk. Perhitungan angka kelahiran menurut kelompok umur dengan rumus sebagai berikut :

21. ANGKA KELAHIRAN MENURUT UMUR (ASFR)

NO	KELOMPOK USIA	JUMLAH PEREMPUAN BERUSIA	KELAHIRAN DARI IBU BERUSIA	ASFR
1	15-19	6210	35	6
2	20-24	7108	314	44
3	25-29	6957	522	75
4	30-34	6731	422	63
5	35-39	5567	257	46
6	40-44	4917	90	18
7	45-49	4468	5	1

Tabel ini mengindikasikan jika banyaknya kelahiran dari perempuan per 1.000 penduduk terletak pada penduduk perempuan kelompok umur 25 – 29 tahun dan kelompok umur 30 – 34 tahun. Perincian ASFR ini menggambarkan bahwa setiap 1.000 wanita usia 25 – 29 tahun secara rata-rata mempunyai 75 anak selama masa suburnya. Begitu juga dengan penduduk wanita umur 30-34 tahun yang rata-rata mempunya anak sebanyak 63 selama masa suburnya.

2) Rasio Anak Perempuan

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun, disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15 – 49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.Untuk menghitung rasio anak dan perempuan (CWR) digunakan rumus :

CWR = p 0-4/p15-49 X K
p 0-4 = jumlah penduduk dibawah (0-4 tahun)
P (15-49) = jumlah penduduk perempuan umur 15-49 tahun
K = 100

22. RASIO ANAK DAN PEREMPUAN

NO	KECAMATAN	ANAK	PEREMPUAN	RASIO
1	BACUKIKI	2330	6796	34,28
2	UJUNG	2970	9678	30,69
3	SOREANG	3815	12892	29,59
4	BACUKIKI BARAT	3835	12598	30,44
	KOTA PARE PARE	12950	41964	30,86

Tabel 22 ini menjelaskan bahwa pada setiap 100 orang penduduk perempuan berusia 15 – 49 atau mereka yang berada dalam masa suburnya, terdapat 31 anak di bawah 5 tahun (0 – 4 tahun). Tinggi atau rendahnya Rasio Anak dan Perempuan ini juga menggambarkan tinggi atau rendahnya tingkat kelahiran di suatu daerah.

3) Kematian

Tinggi rendahnya tingkat kematian (mortalitas) penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut. Sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan di bidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Tingkat kematian dipengaruhi oleh : faktor sosial ekonomi,

pekerjaan, tempat tinggal, umur, jenis kelamin dan lain-lain. Kematian juga dapat dilihat dari penyebab kematian, seperti akibat penyakit menular, atau penyakit degenerative, kecelakaan maupun penyebab yang lain. Namun berdasarkan data yang ada secara resmi yang terlapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sangat rendah, dimana penerbitan Akta Kematian bagi penduduk yang mengalami kematian sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan data informasi yang ada.

2. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf menyajikan presentasi/proposi penduduk berusia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dibanding jumlah penduduk seluruhnya pada satu tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan mutu dan kemampuan sumberdaya manusia di suatu daerah dalam menyerap informasi pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator maka semakin tinggi pula mutu sumberdaya di suatu daerah.

Indikator AMH digunakan untuk :

- Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan dimana masih banyak ditemukan penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
- Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.
- Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis sehingga angka melek huruf mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

b. Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi sekolah merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam menilai keberhasilan program wajib belajar. Angka partisipasi sekolah mengukur daya serap sektor pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, dimana angka ini memperhitungkan adanya perubahan umur penduduk terutama penduduk umur muda.

Dalam hal ini meningkatnya jumlah murid bukan berarti partisipasi sekolah juga meningkat, karena ukuran perubahan jumlah murid sekolah tidak langsung berpengaruh terhadap partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah murid, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan. Misal APK Sekolah Dasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang duduk di Sekolah Dasar terhadap jumlah penduduk kelompok umur 7 sampai 12 tahun.

APK dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang

sedang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia standar yang berkaitan dengan jenjang masingmasing pendidikan.

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Patisipasi Murni ini dapat menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indicator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Namun APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik dibandingkan APK karena APM melihat atau menunjukkan partisipasi pendidikan pada kelompok usia standar pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar kelompok umurnya.

Cara menghitung APM pada setiap jenjang pendidikan adalah dengan membagi jumlah siswa atau penduduk umur sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk pada kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya.

23. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

NO	UMUR	PELAJAR LAKI-LAKI	PELAJAR PEREMPUAN	PELAJAR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	APM LAKI-LAKI	APM PEREMPUAN	APM
1	07-12 Tahun (SD)	4390	4228	8618	9018	8536	17554	48,68	49,53	49,09
2	13-15 Tahun (SMP)	3657	3420	7077	4325	4052	8377	84,55	84,4	84,48
3	16-18 Tahun (SLTA)	3861	3737	7598	4158	4032	8190	92,86	92,68	92,77
4	JUMLAH	8454	7273	15727	59162	61241	120403	14,29	11,88	13,06
5	JUMLAH	20362	18658	39020	76663	77861	154524	26,56	23,96	25,25

Tabel 23 mengindikasikan bahwa bila ditinjau dari segi Angka Partisipasi Kasar (APK) bahwa partisipasi penduduk usia sekolah terhadap pendidikan masih cukup bagus namun masih mengerucut. Dimana semakin tinggi tingkat pendidikan semakin rendah pula partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Murni masih sangat rendah hal ini disebabkan tingkat kepedulian penduduk terhadap data yang akurat pada kartu keluarga masih sangat rendah. Sehingga banyak dari penduduk yang seharusnya sudah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi atau sudah tidak sekolah tapi masih tercatat sebagai pelajar di database kependudukan.

3. Ekonomi

a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga Kerja (*Manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk

mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial. Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Penduduk yang berusia 15-64 Tahun berjumlah 101.767 (Tabel 6). Dan Jumlah penduduk keseluruhan adalah 150.987. Hal ini berarti proporsi Tenaga kerja (Manpower) Kota Parepare dapat dilihat dari rumus berikut :

$$\% \text{ Manpower} = \frac{\sum \text{penduduk } 15\text{-}64}{\sum \text{penduduk}} \times 100$$

$$= \frac{104.703}{154.524} \times 100$$

$$= 67.75\ \%$$

Data hasil pehtungan menegaskan bahwa Jumlah dan proporsi Tenaga Kerja di Kota Parepare adalah sebesar 67.75 %

24. PROPORSI PENDUDUK YANG BEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	19123	12,38	17157	11,10	36280	23,48
2	MENGURUS RUMAH TANGGA			32340	20,93	32340	20,93
3	PELAJAR/MAHASISWA	20362	13,18	18658	12,07	39020	25,25
4	PENSIUNAN	1072	0,69	497	0,32	1569	1,02
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2132	1,38	2237	1,45	4369	2,83
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI	477	0,31	3	0,00	480	0,31
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	891	0,58	30	0,02	921	0,60
8	PERDAGANGAN	109	0,07	56	0,04	165	0,11
9	PETANI/PEKEBUN	1336	0,86	62	0,04	1398	0,90
10	PETERNAK	10	0,01			10	0,01
11	NELAYAN/PERIKANAN	749	0,48	2	0,00	751	0,49
12	INDUSTRI	12	0,01	3	0,00	15	0,01
13	KONSTRUKSI	30	0,02			30	0,02
14	TRANSPORTASI	370	0,24	1	0,00	371	0,24
15	KARYAWAN SWASTA	3053	1,98	1327	0,86	4380	2,83
16	KARYAWAN BUMN	516	0,33	183	0,12	699	0,45
17	KARYAWAN BUMD	75	0,05	13	0,01	88	0,06
18	KARYAWAN HONORER	477	0,31	607	0,39	1084	0,70
19	BURUH HARIAN LEPAS	2971	1,92	41	0,03	3012	1,95
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	45	0,03	5	0,00	50	0,03
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	55	0,04			55	0,04
22	BURUH PETERNAKAN	5	0,00	1	0,00	6	0,00
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA			16	0,01	16	0,01
24	TUKANG CUKUR	5	0,00			5	0,00
25	TUKANG LISTRIK	1	0,00			1	0,00
26	TUKANG BATU	258	0,17			258	0,17
27	TUKANG KAYU	134	0,09			134	0,09

28	TUKANG SOL SEPATU			1	0,00	1	0,00
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	7	0,00			7	0,00
30	TUKANG JAHIT	25	0,02	52	0,03	77	0,05
32	PENATA RIAS	8	0,01	4	0,00	12	0,01
33	PENATA BUSANA			2	0,00	2	0,00
34	PENATA RAMBUT	1	0,00	1	0,00	2	0,00
35	MEKANIK	23	0,01			23	0,01
36	SENIMAN	8	0,01	4	0,00	12	0,01
38	PARAJI	1	0,00	1	0,00	2	0,00
39	PERANCANG BUSANA	1	0,00	1	0,00	2	0,00
40	PENTERJEMAH	1	0,00			1	0,00
41	IMAM MASJID	5	0,00			5	0,00
42	PENDETA	18	0,01			18	0,01
43	PASTOR	2	0,00			2	0,00
44	WARTAWAN	41	0,03	4	0,00	45	0,03
45	USTADZ/MUBALIGH	8	0,01	1	0,00	9	0,01
46	JURU MASAK	2	0,00	1	0,00	3	0,00
60	WALIKOTA	1	0,00			1	0,00
61	WAKIL WALIKOTA	1	0,00			1	0,00
63	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	19	0,01	6	0,00	25	0,02
64	DOSEN	160	0,10	110	0,07	270	0,17
65	GURU	409	0,26	1000	0,65	1409	0,91
66	PILOT	1	0,00			1	0,00
67	PENGACARA	13	0,01	3	0,00	16	0,01
68	NOTARIS	4	0,00	10	0,01	14	0,01
69	ARSITEK	4	0,00	1	0,00	5	0,00
71	KONSULTAN	8	0,01	1	0,00	9	0,01
72	DOKTER	26	0,02	73	0,05	99	0,06
73	BIDAN			86	0,06	86	0,06
74	PERAWAT	35	0,02	204	0,13	239	0,15
75	APOTEKER	4	0,00	12	0,01	16	0,01
78	PENYIAR RADIO			1	0,00	1	0,00
79	PELAUT	265	0,17	1	0,00	266	0,17
80	PENELITI	1	0,00			1	0,00
81	SOPIR	613	0,40			613	0,40
82	PIALANG	1	0,00			1	0,00
84	PEDAGANG	183	0,12	134	0,09	317	0,21
85	PERANGKAT DESA	3	0,00	1	0,00	4	0,00
87	BIARAWAN/BIARAWATI			5	0	5	0
88	WIRASWASTA	20401	13,2	2848	1,84	23249	15,05
89	PEKERJAAN LAINNYA	92	0,06	54	0,03	146	0,09
.	JUMLAH	76663	49,61	77861	50,39	154524	100

Tabel ini mengindikasikan jika persentase jenis pekerjaan penduduk Kota Parepare paling banyak di Kota Parepare adalah Pelajar dengan persentase sebesar 25,25%, kemudian belum atau tidak bekerja sebesar 23,48% dan Mengurus Rumah tangga sebesar 20,93%, setelah itu Wiraswasta sebesar 15,05%.

Tingginya persentase penduduk yang belum atau tidak bekerja ini kemungkinan juga disebabkan karena sebagian besar penduduk belum mengupdate jenis pekerjaannya dalam database SIAK.

4. Sosial

a. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu

hambatan kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. baik jasmani rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. hamabatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecatatan ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana.

Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang kesejahtraan social, salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). data dan informasi tentang penyandang cacat dan jenis kecatatannya sangat diperlukan dalam rangka memeberikan program pelayanan publik, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang cacat. pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif terhadap pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity (*belas kasihan). Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik yang belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik.

25. PENDUDUK KOTA PAREPARE BERDASARKAN JENIS KECACATAN

NO	JENIS CACAT	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
1	CACAT FISIK	54	0,03	44	0,03	98	0,06
2	CACAT NETRA/BUTA	13	0,01	18	0,01	31	0,02
3	CACAT RUNGU/WICARA	15	0,01	18	0,01	33	0,02
4	CACAT MENTAL/JIWA	49	0,03	36	0,02	85	0,06
5	CACAT FISIK DAN MENTAL	21	0,01	17	0,01	38	0,02
6	CACAT LAINNYA	20	0,01	18	0,01	38	0,02
.	JUMLAH	172	0,11	151	0,10	323	0,21

Tabel 25 ini menggamabrakan bahwa proporsi penduduk berdasarkan kecatatan didominasi oleh penduduk dari kelompok cacat fisik dengan jumlah penyandang sebanyak 98 jiwa. Selanjutnya cacat mental atau jiwa dengan jumlah 85 jiwa. Sedangkan penyandang cacat netra jumlah penyandangnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya.

Proporsi penduduk berdasarkan jenis kecatatan lingkup Pemerintah Kota Parepare ini pada dasarnya belum menggambarkan data seutuhnya, sebab hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare belum mendapatkan data valid terkait penduduk dari kelompok penyandang disabilitas ini. Saat ini melalui pelayanan jemput bola penerbitan dokumen administrasi kependudukan pada penduduk

kelompok rentan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala mampu mengidentifikasi penduduk kelompok rentan di Kota Parepare, khususnya penduduk dari kelompok disabilitas.

C. MOBILITAS PENDUDUK

1. Migrasi Masuk (Mi)

Berikut ini akan diuraikan seberapa besar penduduk yang masuk dalam wilayah Kota Parepare sepanjang Tahun, data tersebut menunjukkan jumlah penduduk yang masuk antar kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan serta penduduk yang pindah masuk antar propinsi.

26. MIGRASI MASUK DARI LUAR KOTA PAREPARE

NO	KECAMATAN	MASUK DARI KAB/KOTA DALAM PROVINSI	DATANG DARI LUAR PROVINSI	JUMLAH
1	LOMPOE	105	52	157
2	VATTANG BACUKIK	10	3	13
3	LEMOE	9	3	12
4	GALUNG MALOANG	66	23	89
5	LABUKKANG	36	26	62
6	UJUNG SABBANG	17	9	26
7	UJUNG BULU	36	19	55
8	LAPADDE	82	54	136
9	MALLUSETASI	16	7	23
10	LAKESSI	4	8	12
11	UJUNG BARU	25	34	59
12	VATTANG SOREANG	24	44	68
13	KAMPUNG PISANG	6	13	19
14	UJUNG LARE	19	23	42
15	BUKIT INDAH	48	42	90
16	BUKIT HARAPAN	81	39	120
17	KAMPUNG BARU	26	24	50
18	CAPPAGALUNG	14	28	42
19	LUMPUE	39	65	104
20	TIRO SOMPE	43	8	51
21	JMPANG MINANGA	27	27	54
22	BUMI HARAPAN	60	59	119
7372	KOTA PAREPARE	793	610	1403

In migration (Mi) adalah angka yang menunjukkan banyaknya yang masuk per 1000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota dalam waktu satu tahun. Migrasi masuk (Mi) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Mi = mig masuk/P X K

Mi = Angka migrasi risen masuk penduduk yang pernah tinggal di daerah lain

Mig masuk = Jumlah Penduduk yang masuk kedaerah tujuan = 1.403 jiwa

P = Jumlah Penduduk daerah tujuan = 154.524 jiwa

K = Konstanta.

Mi = 1.403/154.524 X 1000
= 0,015975 X 1000
= 9.07

Dari hasil perhitungan berdasarkan data tabel 26 diketahui terdapat migrasi masuk sebanyak 9 orang per 1000 penduduk Kota Parepare. Jumlah penduduk yang masuk ke Kota Parepare ini terbilang kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar. Rata-rata penduduk yang melakukan pindah masuk ke Kota Parepare karena alasan keluarga, pendidikan, pekerjaan dan alasan lainnya.

2. Migrasi Keluar (Out migration/Mo)

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan data jumlah penduduk yang melakukan perpindahan ke daerah lain, baik antar kabupaten/kota dalam Propinsi Sulawesi Selatan maupun antar propinsi.

27. MIGRASI KELUAR KOTA PAREPARE

NO	KELURAHAN	PINDAH KELUAR KAB/KOTA SE PROVINSI	PINDAH KELUAR PROVINSI	JUMLAH
1	LOMPOE	98	67	165
2	WATTANG BACUKI	12	12	24
3	LEMOE	21	22	43
4	GALUNG MALOAN	47	33	80
5	LABUKKANG	31	59	90
6	UJUNG SABBANG	34	33	67
7	UJUNG BULU	34	53	87
8	LAPADDE	128	94	222
9	MALLUSETASI	19	24	43
10	LAKESSI	10	19	29
11	UJUNG BARU	50	19	69
12	WATTANG SOREAI	54	62	116
13	KAMPUNG PISANG	18	19	37
14	UJUNG LARE	42	26	68
15	BUKIT INDAH	61	87	148
16	BUKIT HARAPAN	82	51	133
17	KAMPUNG BARU	38	29	67
18	CAPPAGALUNG	44	45	89
19	LUMPUE	62	50	112
20	TIRO SOMPE	43	28	71
21	SUMPANG MINAN	58	31	89
22	BUMI HARAPAN	65	44	109
7372	KOTA PAREPARE	1051	907	1958

Out Migration/Mo adalah angka yang menunjukkan banyaknya migrant keluar dari suatu Kabupaten/Kota per 1000 penduduk daerah asal dengan waktu satu tahun.
Rumus :

Mo = mig out/P X K
Mo = Angka migrasi risen keluar Penduduk
Mig out = jumlah penduduk yang pindah keluar selama 1 tahun = 3.838
P = Jumlah Penduduk = 150.987
K = Konstanta.

$$Mo = 1.958/154.524 \times 1000$$
$$= 0.025419 \times 1000$$
$$= 12.67$$

Berdasarkan data pada Tabel 27 diketahui dari 1000 penduduk Kota Parepare terdapat terdapat migrasi keluar sebanyak 12-13 orang. Migrasi keluar ini didominasi karena alasan pekerjaan, keluarga dan pendidikan.

3. Migrasi Neto (Nett Migration/ Mn)

Angka ini merupakan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar, maka disebut migrasi neto positif, dalam kondisi terbalik disebut migrasi neto negatif. Rumus yang digunakan adala : Mn = Mig out-Mig masuk/P X K

Mn = Migrasi Neto

Mig Masuk = jumlah Penduduk yang pindah datang dalam kurun waktu 1 tahun

Mig out = jumlah penduduk yang pindah keluar dalam kurun waktu 1 tahun

P = Penduduk

K = Konstanta

$$Mn = \frac{1.958 - 1.403}{154.524} \times 1000$$

$$= \frac{555}{154.524} \times 1000$$

$$= 3.59$$

Berdasarkan data pada Tabel 27 diketahui Kota Parepare memiliki Migrasi Neto sebesar 3 - 4 orang dari setiap 1000 penduduk.

4. Migrasi Bruto (Bruto Migration)

Migrasi Bruto ini adalah angka yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan penduduk daerah tujuan dalam satu tahun.

$$Mbruto = \frac{\sum \text{Mig Masuk} + \sum \text{Mig Out}}{\sum \text{Penduduk}.2} \times K$$

$$Mb = \frac{1.958 + 1.403}{154.524 \times 2} \times 1000$$

$$= \frac{3.361}{309.048} \times 1000$$

$$= 0,0108 \times 1000$$

$$= 10,87$$

Berdasarkan perhitungan di atas, Kota Parepare memiliki Migrasi Bruto sebesar 10 - 11 dari setiap 1000 penduduk.

5. Migrasi Desa/Kota

Karena Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan, maka tak satupun Desa ada di dalamnya, artinya semua penduduk Kota Parepare adalah penduduk perkotaan, oleh sebab itu untuk mobilitas penduduk berkaitan dengan Migrasi Desa/ Kota dianggap tidak ada, yang adalah mobilitas penduduk yang pindah antar kelurahan, dan antar kecamatan dalam wilayah Kota Parepare.

6. Mobilitas Permanen

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara suatu daerah dengan daerah lain.

Analisis tentang migrasi atau mobilitas penduduk merupakan indikator yang penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Tingkat mobilitas penduduk baik mobilitas permanen maupun nonpermanent akan tampak nyata pada satuan unit administrasi yang lebih kecil dari propinsi, sehingga analisis mobilitas akan lebih baik bila dilakukan pada wilayah administrasi setingkat kabupaten/kota, Kecamatan maupun desa/kelurahan. Berkaitan dengan arus migrasi, indikator yang digunakan dalam perhitungannya adalah :

- Migrasi Masuk (Mi)
- Migrasi Keluar (Mo)
- Migrasi Netto (Mn)
- Migrasi Bruto (Mb)
- Persentase Migrasi dari Pedesaan ke Perkotaan

Ukuran-ukuran indikator tersebut bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah (Kabupaten/Kota) merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya atau wilayah

lainnya untuk melakukan migrasi. Sebaliknya juga menunjukkan apakah suatu daerah, karena berbagai keterbatasan sumber daya, adanya tekanan atau alasan-alasan tertentu menjadi faktor pendorong bagi penduduk di wilayahnya untuk berpindah ke daerah lain. Angka migrasi biasanya dihitung menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

BAB IV
KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Akta Kematian dan Akta perkawinan / Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dengan kedua orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain, kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

A. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

Kartu keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena berstatus janda dan Untuk menghindari kepala keluarga ganda perempuan juga menjadi kepala keluarga apabila menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki. Begitupun dengan istri pertama, sesuai kesepakatan dalam keluarga tersebut.

28. KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

KELURAHAN/KECAMATAN	SUDAH PERBARUI	%	BELUM PERBARUI	%	JUMLAH KELUARGA
LOMPOE	1134	33,32	2263	66,5	3403
WT. BACUKIKI	223	32,55	459	67,01	685
LEMOE	360	39,74	545	60,15	906
GALUNG MALOANG	653	32,28	1370	67,72	2023
KEC. BACUKIKI	**2370**	**33,78**	**4637**	**66,08**	**7017**
LABUKKANG	772	34,04	1493	65,83	2268
UJUNG SABBANG	413	39,22	636	60,4	1053
UJUNG BULU	672	35,2	1232	64,54	1909
LAPADDE	1745	36,75	2995	63,08	4748
MALLUSETASI	257	40,66	375	59,34	632
KEC. UJUNG	**3859**	**36,37**	**6731**	**63,44**	**10610**
LAKESSI	397	40,39	585	59,51	983
UJUNG BARU	647	39,45	993	60,55	1640
WATANG SOREANG	831	38,1	1349	61,85	2181
KAMPUNG PISANG	410	39,96	615	59,94	1026
UJUNG LARE	470	37,93	768	61,99	1239
BUKIT INDAH	1318	35,97	2342	63,92	3664
BUKIT HARAPAN	1347	39,07	2094	60,73	3448
KEC. SOREANG	**5420**	**38,22**	**8746**	**61,67**	**14181**
KAMPUNG BARU	631	38,45	1004	61,18	1641
CAPPA GALUNG	864	37,91	1411	61,91	2279
LUMPUE	1155	38,55	1838	61,35	2996
TIRO SOMPE	812	37,66	1341	62,2	2156
SUMPANG MINANGAE	733	40,54	1070	59,18	1808
BUMI HARAPAN	1055	33,58	2081	66,23	3142
KEC. BACUKIKI BARAT	**5250**	**37,44**	**8745**	**62,37**	**14022**
KOTA PARE PARE	16899	36,87	28859	62,97	45830

Tabel 28 ini mengindikasikan jika dari 45.830 Kepala Keluarga di Kota Parepare, sebanyak 36, 87 persen penduduk Kota Parepare sudah melakukan pembaharuan Kartu Keluarga menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan kertas HVS 80 gram ukuran A4, sedangkan 62,97 persen sisanya masih menyimpan Kartu keluarga model lama yang menggunakan kertas khusus bersegel dengan format tanda tangan basah dari Kepala Dinas Dukcapil.

Dinas Dukcapil Kota Parepare sendiri terus mendorong warga untuk melakukan pembaharuan kartu keluarga secara berkala untuk mengupdate data keluarga, utamanya data status kawin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan golongan darah. Dengan pembaharuan kartu keluarga maka diharapkan data kependudukan penduduk Kota Parepare bisa jauh lebih valid dan diakui keakuratannya.

B. KEPEMILIKAN KTP-EL

29. KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK

KELURAHAN/KECAMATAN	WAJIB KTP-el LAKI-LAKI	WAJIB KTP-el PEREMPUAN	TOTAL	BER KTP
LOMPOE	4006	4106	8112	8112
WT. BACUKIKI	788	824	1612	1612
LEMOE	1061	1079	2140	2140
GALUNG MALOANG	2274	2409	4683	4683
KEC. BACUKIKI	**8129**	**8418**	**16547**	**16547**
LABUKKANG	2502	2680	5182	5182
UJUNG SABBANG	1175	1260	2435	2435
UJUNG BULU	2139	2276	4415	4415
LAPADDE	5492	5842	11334	11334
MALLUSETASI	694	765	1459	1459
KEC. UJUNG	**12002**	**12823**	**24825**	**24825**
LAKESSI	1100	1206	2306	2306
UJUNG BARU	1871	1977	3848	3848
WATANG SOREANG	2486	2615	5101	5101
KAMPUNG PISANG	1157	1258	2415	2415
UJUNG LARE	1416	1495	2911	2911
BUKIT INDAH	4333	4456	8789	8789
BUKIT HARAPAN	4034	4065	8099	8099
KEC. SOREANG	**16397**	**17072**	**33469**	**33469**
KAMPUNG BARU	1816	1951	3767	3767
CAPPA GALUNG	2432	2646	5078	5078
LUMPUE	3340	3559	6899	6899
TIRO SOMPE	2445	2513	4958	4958
SUMPANG MINANGAE	1935	2092	4027	4027
BUMI HARAPAN	3622	3817	7439	7439
KEC. BACUKIKI BARAT	**15590**	**16578**	**32168**	**32168**
KOTA PARE PARE	52118	54891	107009	107009

Data wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman KTP-el saat ini sudah mencapai 100 persen, tingginya tingkat kepemilikan KTP-el penduduk Kota Parepare ini dimungkinkan karena Dinas Dukcapil Kota Parepare secara berkala intens melakukan perekaman mobile dan rutin

menghubungi wajib KTP-el baru untuk segera melakukan perekaman KTP-el. Selain itu Dinas Dukcapil Kota Parepare juga rutin memanggil penduduk yang masih berusia 16 tahun untuk melakukan perekaman KTP-el, sehingga begitu masuk usia 17 tahun, penduduk dimaksud tidak perlu melakukan perekaman KTP-el lagi, tapi bisa langsung diterbitkan oleh petugas layanan Dinas Dukcapil Kota Parepare

C. KEPEMILIKAN AKTA PENCATATAN SIPIL

1. Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase kepemilikan akta kelahiran di Kota Parepare sudah mencapai 77,47%. Data kepemilikan akta kelahiran tersebut merupakan data pelayanan sejak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil resmi melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan Tahun 2011, ditambah jumlah kepemilikan akta kelahiran yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang menangani pencatatan sipil sebelum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbentuk. Dan seiring dengan program nawacita untuk mewujudkan kepemilikan akta kelahiran bagi warga negara yang berumur 0-18 tahun maka Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga gencar melaksanakan pencatatan akta kelahiran pada setiap penduduk, khususnya penduduk usia 0 – 18 tahun. Sementara itu, khusus kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk Kota Parepare yang berusia 0-18 Tahun dapat dilihat pada tabel berikut ;

30. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

KELURAHAN/KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN				BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN				PENDUDUK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	PERSENTASE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	PERSENTASE	
LOMPOE	4812	4694	9506	79,26	1228	1258	2486	20,73	11993
WT. BACUKIKI	1018	1048	2066	89,9	113	119	232	10,1	2298
LEMOE	1297	1284	2581	85,46	214	225	439	14,54	3020
GALUNG MALOANG	2825	2887	5712	80,07	695	727	1422	19,93	7134
KEC. BACUKIKI	**9952**	**9913**	**19865**	**81,26**	**2250**	**2329**	**4579**	**18,73**	**24445**
LABUKKANG	2708	2747	5455	73,6	954	1003	1957	26,4	7412
UJUNG SABBANG	1261	1276	2537	74,27	421	458	879	25,73	3416
UJUNG BULU	2378	2428	4806	76,61	700	767	1467	23,39	6273
LAPADDE	6271	6242	12513	76,77	1813	1973	3786	23,23	16299
MALLUSETASI	750	736	1486	74,64	228	277	505	25,36	1991
KEC. UJUNG	**13368**	**13429**	**26797**	**75,72**	**4116**	**4478**	**8594**	**24,28**	**35391**
LAKESSI	1187	1190	2377	74,1	393	438	831	25,9	3208
UJUNG BARU	1971	2093	4064	74,76	679	693	1372	25,24	5436
WATANG SOREANG	2932	2876	5808	78,58	784	799	1583	21,42	7391
KAMPUNG PISANG	1224	1267	2491	74,09	403	468	871	25,91	3362
UJUNG LARE	1600	1568	3168	76,82	463	493	956	23,18	4124
BUKIT INDAH	4874	4822	9696	76,44	1446	1541	2987	23,55	12685
BUKIT HARAPAN	4862	4693	9555	80,46	1181	1140	2321	19,54	11876
KEC. SOREANG	**18650**	**18509**	**37159**	**77,28**	**5349**	**5572**	**10921**	**22,71**	**48082**
KAMPUNG BARU	1933	1994	3927	73,86	658	730	1388	26,1	5317
CAPPA GALUNG	2754	2865	5619	75,98	850	926	1776	24,02	7395
LUMPUE	3796	3932	7728	79,23	1004	1021	2025	20,76	9754
TIRO SOMPE	2849	2833	5682	77,73	800	828	1628	22,27	7310
SUMPANG MINANGAE	2066	2241	4307	74,44	732	747	1479	25,56	5786
BUMI HARAPAN	4357	4272	8629	78,13	1175	1239	2414	21,86	11044
KEC. BACUKIKI BARAT	**17755**	**18137**	**35892**	**77,01**	**5219**	**5491**	**10710**	**22,98**	**46606**
KOTA PARE PARE	59725	59988	119713	77,47	16934	17870	34804	22,52	154524

Sedangkan khusus penduduk usia 0-18 tahun, tingkat kepemilikan akta kelahiran termasuk cukup tinggi, yaitu mencapai 99,97 persen, Tingginya tingkat kepemilikan dokumen ini dimungkinkan karena saat ini

Dinas Dukcapil Kota Parepare telah bekerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan yang ada di Kota Parepare, sehingga anak yang baru lahir bisa langsung dapat mengakses penerbitan akta kelahiran.

31. KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0-18

KELURAHAN/KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN				BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN				PENDUDUK
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	PERSENTASE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	PERSENTASE	
WT. BACUKIKI	386	388	774	99,87	1		1	0,13	775
LEMOE	507	489	996	100					996
GALUNG MALOANG	1363	1323	2686	99,96	1		1	0,04	2687
KEC. BACUKIKI	**4489**	**4253**	**8742**	**99,98**	**2**		**2**	**0,02**	**8744**
LABUKKANG	1297	1206	2503	100					2503
UJUNG SABBANG	569	529	1098	99,82	2		2	0,18	1100
UJUNG BULU	1056	1040	2096	99,95	1		1	0,05	2097
LAPADDE	2858	2637	5495	100					5495
MALLUSETASI	324	289	613	100					613
KEC. UJUNG	**6104**	**5701**	**11805**	**99,97**	**3**		**3**	**0,03**	**11808**
LAKESSI	544	475	1019	100					1019
UJUNG BARU	862	903	1765	99,89	1	1	2	0,11	1767
WATANG SOREANG	1341	1197	2538	99,96	1		1	0,04	2539
KAMPUNG PISANG	533	537	1070	100					1070
UJUNG LARE	715	651	1366	100					1366
BUKIT INDAH	2211	2099	4310	100					4310
BUKIT HARAPAN	2217	1969	4186	99,98		1	1	0,02	4187
KEC. SOREANG	**8423**	**7831**	**16254**	**99,98**	**2**	**2**	**4**	**0,02**	**16258**
KAMPUNG BARU	867	872	1739	100					1739
CAPPA GALUNG	1300	1271	2571	100					2571
LUMPUE	1625	1571	3196	99,94	2		2	0,06	3198
TIRO SOMPE	1338	1276	2614	99,96	1		1	0,04	2615
SUMPANG MINANGAE	941	989	1930	99,95		1	1	0,05	1931
BUMI HARAPAN	2116	1876	3992	99,95	1	1	2	0,05	3994
KEC. BACUKIKI BARAT	**8187**	**7855**	**16042**	**99,96**	**4**	**2**	**6**	**0,04**	**16048**
KOTA PARE PARE	27203	25640	52843	99,97	11	4	15	0,03	52858

2. Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan

32. KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN / KAWIN TERCATAT

KELURAHAN/KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN				BELUM MEMILIKI AKTA PERKAWINAN				JUMLAH PENDUDUK STATUS KAWIN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	PERSENTASE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	PERSENTASE	
LOMPOE	2214	2318	4532	84,6	252	394	646	12,06	5357
WT. BACUKIKI	426	438	864	81,05	77	105	182	17,07	1066
LEMOE	592	594	1186	81,23	120	149	269	18,42	1460
GALUNG MALOANG	1383	1436	2819	86,82	189	237	426	13,12	3247
KEC. BACUKIKI	**4615**	**4786**	**9401**	**84,47**	**638**	**885**	**1523**	**13,68**	**11130**
LABUKKANG	1186	1237	2423	79,94	277	330	607	20,03	3031
UJUNG SABBANG	542	563	1105	81,19	76	114	190	13,96	1361
UJUNG BULU	1034	1100	2134	83,69	107	191	298	11,69	2550
LAPADDE	2881	3025	5906	83,86	524	611	1135	16,12	7043
MALLUSETASI	321	331	652	80,79	73	82	155	19,21	807
KEC. UJUNG	**5964**	**6256**	**12220**	**82,61**	**1057**	**1328**	**2385**	**16,12**	**14792**
LAKESSI	493	508	1001	75,04	153	180	333	24,96	1334
UJUNG BARU	896	923	1819	80,06	216	237	453	19,94	2272
WATANG SOREANG	1264	1319	2583	81,64	270	310	580	18,33	3164
KAMPUNG PISANG	509	528	1037	76,47	157	162	319	23,53	1356
UJUNG LARE	724	764	1488	84,88	126	139	265	15,12	1753
BUKIT INDAH	2083	2197	4280	81,51	442	519	961	18,3	5251
BUKIT HARAPAN	2080	2151	4231	83,95	379	428	807	16,01	5040
KEC. SOREANG	**8049**	**8390**	**16439**	**81,5**	**1743**	**1975**	**3718**	**18,43**	**20170**
KAMPUNG BARU	786	840	1626	74,97	263	277	540	24,9	2169
CAPPA GALUNG	1201	1238	2439	80,39	261	320	581	19,15	3034
LUMPUE	1705	1773	3478	81,72	379	386	765	17,97	4256
TIRO SOMPE	1122	1176	2298	78,19	300	341	641	21,81	2939
SUMPANG MINANGAE	1025	1057	2082	82	216	241	457	18	2539
BUMI HARAPAN	2070	2114	4184	86,45	294	360	654	13,51	4840
KEC. BACUKIKI BARAT	**7909**	**8198**	**16107**	**81,44**	**1713**	**1925**	**3638**	**18,4**	**19777**
KOTA PARE PARE	26537	27630	54167	82,23	5151	6113	11264	17,1	65869

Dari tabel ini diketahui bahwa, dari 65.869 penduduk Kota Parepare yang berstatus Kawin, 82.23 % tercatat sudah memiliki akta nikah di database kependudukan. Untuk meningkatkan kepemilikan akta nikah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare bekerja sama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian Agama. Kerjasama ini memungkinkan Dinas Dukcapil Kota Parepare dapat mengakses akta perkawinan penduduk secara realtime. Kerjasama ini juga mampu meningkatkan kepemilikan dokumen akta nikah sampai 82 persen persen di tahun ini. Saat ini Dinas Dukcapil Kota Parepare juga bekerjasama dengan Kementerian dalam penerbitan dokumen Adminduk penduduk yang baru saja melakukan akad nikah, kerjasama ini memungkinkan penduduk yang sudah melakukan akad nikah bisa langsung mendapatkan buku nikah sekaligus KK dan KTP-el dengan perubahan status sudah menikah di dokumen Adminduknya.

3. Kepemilikan Akta Perceraian

33. KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN / CERAI TERCATAT

KECAMATAN/KELURAHAN	KEPEMILIKAN AKTA CERAI				BELUM MEMILIKI AKTA CERAI				TOTAL PENDUDUK CERAI
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL TERCATAT	PERSENTASE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL TERCATAT	PERSENTASE	
LOMPOE	89	112	201	87,01	9	15	24	10,39	231
WT. BACUKIKI	17	26	43	79,63	1	8	9	16,67	54
LEMOE	16	19	35	66,04	2	3	5	9,43	53
GALUNG MALOANG	39	83	122	85,92	4	6	10	7,04	142
KEC. BACUKIKI	**161**	**240**	**401**	**83,54**	**16**	**32**	**48**	**10**	**480**
LABUKKANG	72	110	182	86,26	5	19	24	11,37	211
UJUNG SABBANG	29	33	62	55,86	6	9	15	13,51	111
UJUNG BULU	54	72	126	66,67	7	9	16	8,47	189
LAPADDE	116	163	279	74,6	9	23	32	8,56	374
MALLUSETASI	12	16	28	49,12	6	5	11	19,3	57
KEC. UJUNG	**283**	**394**	**677**	**71,87**	**33**	**65**	**98**	**10,4**	**942**
LAKESSI	31	42	73	68,22	2	12	14	13,08	107
UJUNG BARU	35	56	91	70	1	8	9	6,92	130
WATANG SOREANG	67	94	161	78,16	4	4	8	3,88	206
KAMPUNG PISANG	24	47	71	63,96	7	7	14	12,61	111
UJUNG LARE	27	40	67	66,34	3	7	10	9,9	101
BUKIT INDAH	88	116	204	69,39	14	26	40	13,61	294
BUKIT HARAPAN	76	113	189	69,74	7	13	20	7,38	271
KEC. SOREANG	**348**	**508**	**856**	**70,16**	**38**	**77**	**115**	**9,43**	**1220**
KAMPUNG BARU	48	76	124	62,63	5	22	27	13,64	198
CAPPA GALUNG	59	82	141	63,51	7	18	25	11,26	222
LUMPUE	60	99	159	71,95	4	11	15	6,79	221
TIRO SOMPE	81	114	195	82,63	5	18	23	9,75	236
SUMPANG MINANGAE	47	75	122	87,14	10	6	16	11,43	140
BUMI HARAPAN	63	115	178	74,48	11	21	32	13,39	239
KEC. BACUKIKI BARAT	**358**	**561**	**919**	**73,17**	**42**	**96**	**138**	**10,99**	**1256**
KOTA PARE PARE	1150	1703	2853	73,19	129	270	399	10,24	3898

Dari 3.898 penduduk Kota Parepare yang berstatus cerai hidup, 73.19 % di antaranya tercatat sudah memiliki akta cerai di database kependudukan. Untuk meningkatkan keakuratan data base kependudukan, khususnya data terkait pencatatan perceraian, Dinas Dukcapil Kota Parepare bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Parepare. Kerja sama ini cukup membantu Dinas Dukcapil dalam mengupdate data perceraian penduduk Kota Parepare.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2021 merupakan gambaran perkembangan Kependudukan Kota Parepare pada Tahun 2020. Data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah data hasil Konsolidasi Bersih (DKB) yang dilakukan oleh Kemendagri untuk menghindari data ganda dan anomali. Selain menggunakan data DKB, Profil Perkembangan Kependudukan ini juga disusun berdasarkan Data Hasil Pelayanan yang dilakukan setiap hari dan jam kerja yang yang tersimpan dalam Database Kependudukan SIAK Kota Parepare Tahun 2021.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan di Kota Parepare dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi dan berbagai pihak yang membutuhkannya.

Untuk perbaikan dan penyusunan serta penyajian Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare tahun berikutnya, maka diperlukan komitmen dan dukungan berbagai pihak khususnya Instansi yang berkaitan dengan kependudukan, sehingga Profil Perkembangan Kependudukan Tahun mendatang akan lebih baik, lengkap, akurat dan tepat waktu.

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Parepare Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap semoga Informasi yang kami sajikan dalam Profil Perkembangan Kependudukan ini bermanfaat bagi seluruh aspek dan sendi kehidupan masyarakat dan Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi Sulawesi Selatan , dan Pemerintah Kota Parepare pada khususnya.